

**MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN
KEBAKARAN DI KOTA BANDUNG**

ARTIKEL TESIS

OLEH :

HENDRI NUGRAHA

NPM : 208010005



**PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2023**

BAB I PENDAHULUAN

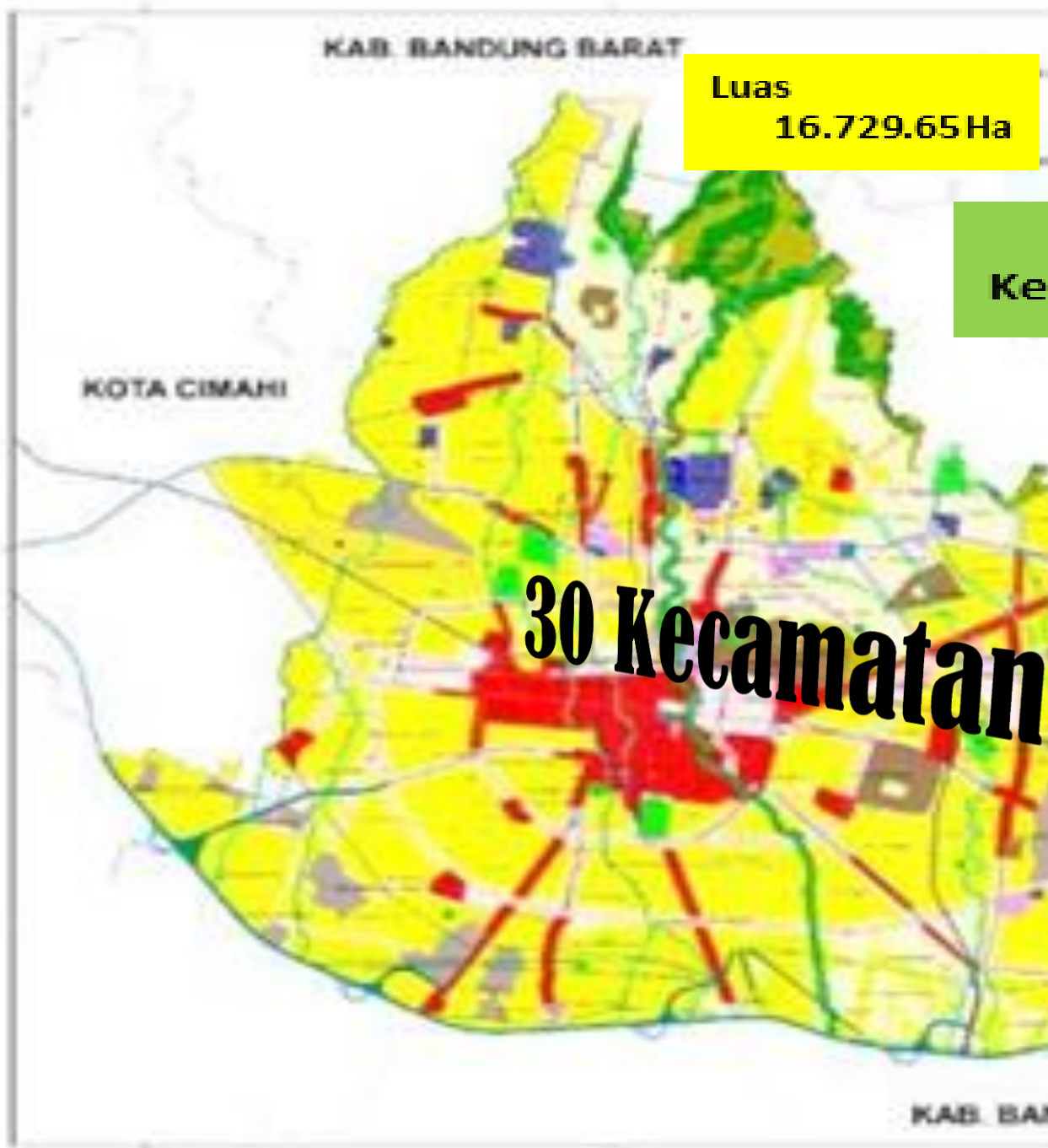
1.1. Latar Belakang Penelitian

Ancaman bahaya kebakaran merupakan ancaman bersama, terlebih ketika ancaman bahaya tersebut berubah menjadi suatu bencana yang dapat merugikan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Hangusnya pemukiman penduduk, rusaknya lingkungan hidup dan sarana prasarana utilitas umum, hilangnya harta benda, korban jiwa hingga gangguan psikologis, merupakan potensi ancaman bahaya kebakaran yang kerap terjadi dan harus mampu dicegah serta ditanggulangi bersama secara lebih efektif dan efisien.

Demikian halnya dengan ancaman bencana kebakaran di Kota Bandung. Dimana, potensi ancaman bencana yang semakin tinggi harus mampu dicegah dan di tanggulangi bersama secara lebih terstruktur dan berkesinambungan, guna melindungi $\pm 2,53$ juta jiwa penduduk kota pada malam hari dan $\pm 2,7$ juta jiwa di siang hari. Kepadatan penduduk yang terus bertambah hingga $\pm 15,17$ ribu jiwa per km persegi dengan aktivitas perekonomian yang semakin tinggi dan kompleks, mampu menciptakan kondisi Ibukota Provinsi Jawa Barat tersebut menjadi sangat rentan terhadap ancaman terjadinya suatu bencana. (Lia Muliawaty, 2019)

Musibah kebakaran merupakan bencana yang kerap terjadi di tengah hiruk-pikuknya kehidupan Kota Bandung. Kerapatan pemukiman penduduk dengan pelbagai konstruksi bangunan yang cenderung vertikal menjadi suatu fenomena kondisi bangunan yang dapat memicu semakin besarnya potensi ancaman bahaya musibah kebakaran berubah menjadi suatu bencana yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar. Musibah kebakaran bukan satu-satunya potensi ancaman bencana bagi Kota Bandung, ancaman bahaya banjir dan longsor di beberapa wilayah kota, angin puting beliung, pohon tumbang, ancaman terjadinya getaran bumi atau gempa berkekuatan besar yang di akibatkan dari pergerakan aktif Sesar Lembang hingga ancaman hewan liar yang memasuki pemukiman penduduk, merupakan beberapa ancaman serius bagi Kota Bandung yang harus dikelola bersama dalam pengendaliannya.

GAMBAR 1.1. PETA WILAYAH KOTA BANDUNG



Sumber: Bidang Kesiapsiagaan Operasi Pemasukan dan Penyelamatan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung 2022

Kota Bandung memiliki luas wilayah $\pm 16.729.65$ hektar terdiri dari 30 kecamatan dan 151 kelurahan tersebut, merupakan kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat yang dijadikan sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan. Seiring dengan pesatnya pembangunan di Kota Bandung, musibah kebakaran merupakan bencana yang kerap terjadi dalam prosesnya. Berdasarkan

jumlah angka kebakaran di Kota Bandung, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung telah mencatat sejumlah pengaduan masyarakat terkait laporan kebakaran dari tahun ke tahunnya:

TABEL 1.1.
DATA KEBAKARAN DI KOTA BANDUNG

Tahun	Jumlah Kejadian	Korban		Luas (M2)	Kerugian (Rp)
		MD	LK		
2007	160	3	10	38044	36,521,500,000
2008	141	1	8	23261	12,235,700,000
2009	121	2	9	21565	10,001,200,000
2010	101	0	4	24471	61,282,500,000
2011	124	1	5	12064	12,430,250,000
2012	137	0	0	36535	11,871,000,000
2013	131	1	3	24990	27,356,500,000
2014	162	2	4	40076	182,381,500,000
2015	177	1	4	100577	21,560,000,000
2016	107	2	10	9954	22,738,500,000
2017	198	5	18	43195	53,633,200,000
2018	258	3	24	96839	41,460,100,000
2019	272	7	82	61029	41,203,700,000
2020	195	0	39	82797	705,919,770,185
2021	182	3	19	22780	337,136,566,000

Sumber: Bidang Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung 2022

Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dengan pertimbangan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah menginstruksikan, bahwa pemerintah daerah harus menyesuaikan organisasi perangkat daerah guna membantu tugas pemerintah daerah dalam aspek pelayanan masyarakat sebagai upaya pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan kehidupan. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, sebagai respon implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tersebut.

Berdasarkan fenomena di lapangan, *collaborative governance* dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung yang dilakukan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung belum optimal. Dimana, peneliti mengindikasikan *collaborative governance* yang dilakukan belum melalui pendekatan kolaborasi secara teoritis, sehingga proses yang dilakukannya cenderung belum berdampak pada perubahan *mindset* para *stakeholder* dalam

upaya penanganan kebakaran di Kota Bandung. Berikut dimensi-dimensi *collaborative governance* yang seharusnya menjadi pusat perhatian bagi Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dalam penyelenggaraannya:

- 1) Kondisi Awal (*Starting Conditions*)
Belum menyadari dan memahami sepenuhnya terkait kondisi awal yang dimiliki organisasi, seperti adanya kesenjangan atau keterbatasan sumber daya dan pengetahuan dalam penanganan kebakaran. Dimana, keterbatasan sumber daya manusia dalam aspek kualitas dan kuantitas dapat menjadi salah satu faktor penghambat dalam kolaborasi, kualifikasi kompetensi pegawai yang belum memadai dan disesuaikan dengan potensi ancaman bencana yang semakin meningkat dan kompleks. Rotasi mutasi pegawai maupun pimpinan yang kerap silih berganti berdampak pada profesionalisme kinerja organisasi relatif menurun, karena peningkatan kapasitas sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya belum dijadikan sebagai prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahannya.
- 2) Kepemimpinan Fasilitatif (*Fasilitative Leadership*)
Belum optimalnya penerapan gaya kepemimpinan fasilitatif yang diterapkan oleh para pemimpin di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Kebijakan rotasi mutasi pimpinan memungkinkan perubahan penerapan gaya kepemimpinan yang diterapkan akan berbeda dan cenderung berubah-ubah. Gaya kepemimpinan yang mampu merangkul, mengajak, mengintegrasikan, mengelola dan memberdayakan para *stakeholder* secara umum belum nampak dengan optimal. Sementara, penerapan gaya kepemimpinan fasilitatif menjadi esensial sekaligus memiliki sisi *urgency* yang tinggi bagi *leading sector* pencegahan dan penanggulangan kebakaran, mengingat potensi ancaman musibah kebakaran dan bencana lainnya yang semakin tinggi, tidak mampu dilakukan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung secara mandiri karena berbagai keterbatasan sumber daya yang dimilikinya. Sehingga, kepemimpinan fasilitatif memungkinkan untuk mampu mengintegrasikan serta memfasilitasi keterlibatan para *stakeholder* dalam berperan aktif menangani kebakaran di Kota Bandung. Sementara, proses kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung masih dalam tahap komunikasi dan koordinasi di lapangan atau pada saat kejadian saja, namun tidak berlanjut ke arah forum kerjasama yang lebih formal dalam upaya penanganan kebakaran di Kota Bandung.
- 3) Desain Kelembagaan (*Institutional Design*)
Belum optimalnya pemanfaatan serta interpretasi desain kelembagaan yang telah terbangun. Kelembagaan dalam upaya penanganan kebakaran umumnya telah terkonstruksi seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman musibah kebakaran yang kerap terjadi melalui permintaan kegiatan penyuluhan, sosialisasi maupun pelatihan. Namun, regulasi dalam pengelolaannya belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan optimal,

mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki organisasi. Sehingga, interpretasi serta aktualisasi peran *stakeholders* belum dapat dilakukan secara optimal.

4) Proses Kolaborasi (*Collaboration Process*)

Belum optimalnya proses kolaborasi dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung, dilatarbelakangi belum disadari dan dipahami secara mendalam terkait proses kolaborasi. Dimana, proses kolaborasi merupakan suatu siklus yang didalamnya memiliki dimensi-dimensi kolaborasi yang saling memberikan kontribusi penting, seperti dimensi kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif dan desain kelembagaan akan berdampak pada proses kolaborasi. Belum optimalnya pemahaman serta implementasi Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dalam *collaborative governance* berdampak pada proses kolaborasinya pun belum berjalan dengan baik. Berikut siklus *collaborative governance* dalam dimensi proses kolaborasi model *collaborative governance* yang diungkapkan oleh Ansell dan Gash (2018:13-14):

1) Dialog Tatap Muka (*Face to Face Dialogue*)

Dialog tatap muka antar *stakeholders* belum optimal dilakukan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dengan optimal. Sejatinya, dialog tatap muka dan berkomunikasi merupakan interaksi sebagai fasilitas awal dalam proses kolaborasi guna membangun kepercayaan, kesepahaman hingga komitmen dari para *stakeholder* dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung. Interaksi dan dialog secara tatap muka yang belum optimal, berdampak pada belum terwujudnya konsensus atau kesepakatan/kesediaan serta kesepahaman bersama yang ditunjukkan dari para *stakeholder* dalam menginterpretasikan dan mengaktualisasikan pengelolaan menangani kebakaran di Kota Bandung.

2) Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Proses pembangunan kepercayaan antar *stakeholders* belum optimal dilakukan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Hal tersebut diindikasikan karena fasilitas awal yang belum terbangun dengan optimal, berdampak pada rendahnya kepercayaan yang ditunjukkan oleh para *stakeholder* dalam berkolaborasi menangani kebakaran di Kota Bandung. Informasi-informasi yang tidak didapatkan melalui komunikasi dan interaksi dalam dialog secara tatap muka, berdampak pada adanya ketidakjelasan dalam pengelolaan penanganan kebakaran di Kota Bandung.

3) Membangun Komitmen (*Commitment to Process*)

Berangkat dari belum optimalnya dialog tatap muka dan pembangunan kepercayaan yang dilakukan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung terhadap para *stakeholder* dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung, berdampak pada belum optimalnya komitmen serta konsistensi yang ditunjukkan dalam menangani kebakaran di Kota Bandung. Hal tersebut nampak dengan rendahnya

kegigihan serta perhatian terhadap penanganan kebakaran dan para *stakeholder* cenderung memilih untuk fokus dan berorientasi pada tugas masing-masing.

4) Berbagi Pemahaman (*Shared Understanding*)

Rendahnya pemahaman serta kesadaran yang ditunjukkan para *stakeholder* terkait *collaborative governance* dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung, menjadikan proses kolaborasi belum berjalan dengan optimal. Rendahnya komunikasi dan koordinasi terkait pentingnya kolaborasi dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung,

5) Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*)

Dampak yang dihasilkan dalam proses *collaborative governance* penanganan kebakaran di Kota Bandung, belum dapat dilakukan dengan optimal. Karena rendahnya proses kolaborasi dalam berdialog secara tatap muka, rendahnya pembangunan kepercayaan dan komitmen serta berbagi pemahaman antar *stakeholder* dalam penanganan kebakaran yang dilakukan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, berdampak pada perubahan *mindset* dalam berkolaborasi yang ditunjukkan para *stakeholder* cenderung belum optimal.

1.2. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian

1.2.1. Fokus Penelitian

Berdasarkan fenomena permasalahan yang telah dipaparkan, peneliti akan memfokuskan permasalahan pada empat dimensi kolaborasi yang menjadi pusat perhatian dalam model *collaborative governance* penanganan kebakaran di Kota Bandung.

1.2.2. Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian akan dibagi menjadi 5 (lima) sub fokus penelitian terkait faktor *collaborative governance* dalam aspek proses kolaborasi dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung yang menjadi inti dari model *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash, sebagai berikut:

- 1) *Face to Face Dialogue*, Kondisi dialog/komunikasi melalui tatap muka yang dilakukan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dengan para *stakeholder* dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung;
- 2) *Trust Building*, Kondisi pembangunan kepercayaan (identifikasi masalah, nilai-nilai) dan komitmen dari para *stakeholder* yang dilakukan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung;
- 3) *Commitmen to Process*, Kondisi pembangunan komitmen dari para *stakeholder* dalam proses kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung;
- 4) *Shared Understanding*, Kondisi pembangunan kesepahaman para *stakeholder* yang dilakukan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung;
- 5) *Intermediate Outcome*, Kondisi rencana strategis serta terobosan dan

inovasi-inovasi yang dilakukan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung.

1.3. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti merumuskan masalah (*problem statement*) yang menjadi pertanyaan penelitian (*research question*), sebagai berikut:

- 1) Bagaimana *collaborative governance* Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung?
- 2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam *collaborative governance* menangani kebakaran di Kota Bandung?
- 3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dalam membangun *collaborative governance* dalam Penanganan Kebakaran di Kota Bandung?
- 4) Bagaimana Model *Collaborative Governance* yang diterapkan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dalam menangani kebakaran di Kota Bandung?

1.4. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fenomena-fenomena permasalahan dan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini, adalah:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana kondisi *collaborative governance* yang dilakukan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung;
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam *collaborative governance* dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung;
- 3) Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dalam membangun *collaborative governance* penanganan Kebakaran di Kota Bandung;
- 4) Untuk mengetahui model *Collaborative Governance* yang diterapkan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung?

1.4.2. Kegunaan Penelitian

1.4.2.1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penulisan karya tulis ilmiah berupa thesis ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada dunia ilmu pengetahuan, sekaligus sebagai penerapan berbagai teori yang peneliti dapatkan selama menempuh pendidikan di Universitas Pasundan Bandung dan telah memberikan banyak wacana ilmiah mengenai kajian Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik. Pentingnya penerapan pemerintahan kolaboratif (*collaborative governance*) dewasa ini menjadi suatu strategi efektif dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan. Sementara, *collaborative governance* merupakan suatu perwujudan dan cerminan dari implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan

mengedepankan kerjasama yang terintegrasi antar pemerintah, pihak swasta dan masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih professional dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung.

1.4.2.2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai gambaran maupun bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung umumnya dan bagi Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung khususnya, untuk lebih mengedepankan dan menerapkan pemerintahan kolaboratif (*collaborative governance*) secara lebih optimal. Mengingat, semakin pesatnya pembangunan dan tingginya aktivitas perekonomian, maka potensi-potensi ancaman bencana kebakaran dan bencana lainnya akan semakin tinggi dan kompleks. Terlebih, *trend* bencana akan terus meningkat secara signifikan di masa mendatang yang diakibatkan oleh suhu bumi yang tengah mengalami peningkatan maupun gangguan dari cuaca ekstrim (*extreme climate events*). Dengan demikian, Kota Bandung harus mampu meningkatkan kualitas kerjasama antar pemerintah, pihak swasta dan masyarakat akademisi untuk bersama-sama menghadapi tantangan tersebut secara lebih efektif, efisien dan produktif.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR dan PROPOSISI

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian peneliti tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang telah ditulis peneliti lainnya sebagai karya ilmiah. Penelitian terdahulu diperlukan guna menjadi bahan perbandingan sekaligus pedoman bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Dengan demikian, peneliti dapat memperkaya teori yang akan digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan judul penelitian peneliti. Namun, peneliti mengangkat beberapa penelitian yang dianggap relevan dengan fokus penelitian peneliti sekaligus dijadikan sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian peneliti dalam penelitian. Hal ini bermanfaat untuk memberikan gambaran umum atau bahan penjelas tentang konteks penelitian peneliti dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan fokus penelitian peneliti:

2.1.1.1. Hasil Penelitian Fawwas Aldi Tilano dan Sri Suwitri (2018)

Penelitian ini dilakukan karena jumlah angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Berdasarkan data Laka Lantas Polrestabes Semarang pada tahun 2015 di dapat data jumlah angka kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang sebanyak 872 kejadian dan pada tahun 2016 meningkat 24,2% menjadi 1.083 kejadian, sedangkan pada tahun 2017 angka kejadiannya mengalami penurunan 13,57% menjadi 936 kejadian. Demikian halnya dengan jumlah korban pada tahun 2015 sebanyak 1.299 korban dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan 2,85% sebanyak 1.336 korban, sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan 11,6%. Jumlah kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan pada tahun 2015 sebanyak 1.801 kendaraan dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 24,1% menjadi 2.235 kendaraan, pada tahun 2017 mengalami penurunan 31,99% menjadi 1520 kendaraan.

Berdasarkan tinjauan pustaka (*literature review*) dari penelitian terdahulu tentang konsep-konsep dan teori-teori yang digunakan terkait kolaborasi, umumnya memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Namun, yang menjadi pembeda adalah konteks penelitian pada fokus dan lokus yang berbeda, berikut relevansi dalam penelitian penulis dengan penelitian terdahulu, sebagai berikut:

**TABEL 2.1.
RELEVANSI PENELITIAN TERDAHULU DENGAN RENCANA
PENELITIAN PENELITI**

No.	Nama	Judul Penelitian Terdahulu	Teori Yang Digunakan Peneliti	Teori Yang Digunakan Peneliti	Persamaan/Perbedaan

			Terdahulu		
1.	Fawwas Aldi Tilano dan Sri Suwitri (2018)	Collaborative Governance Dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Semarang	Collaborative governance (Ansell dan Gash)	Collaborative governance (Ansell dan Gash, 2018:13)	Kolaborasi sama, Teori sama, Fokus sama dan Lokus berbeda
2.	Syamsul Arifin dan Utami Dewi (2018)	Collaborative Governance Dalam Program Rintisan Desa Inklusif Di Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman	Collaborative governance (Ansell dan Gash)	Collaborative governance (Ansell dan Gash, 2018:13)	Kolaborasi sama, Teori sama, Fokus sama dan Lokus berbeda
3.	Yayan Andri (2020)	Kolaborasi Penanganan Kebijakan Citarum Harum Di Kabupaten Bandung	Collaborative governance (Ansell dan Gash, 2007:558-561)	Collaborative governance (Ansell dan Gash, 2018:13)	Kolaborasi sama, teori sama, metode sama, fokus sama dan lokus berbeda
4.	Muhamma d Faudy Pratama (2022)	Kolaborasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah	Collaborative governance (Ansell dan Gash)	Collaborative governance (Ansell dan Gash, 2018:13)	Kolaborasi sama, teori sama, metode sama, fokus sama dan lokus berbeda
5.	Haeril, Mas'ud dan Kasman (2022)	Kolaborasi Lintas Sektoral Dalam Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Bima	The Integrative Framework for Collaborative Governance	Collaborative governance (Ansell dan Gash, 2018:13)	Kolaborasi sama, teori berbeda, fokus berbeda, lokus berbeda

Sumber: Diolah Peneliti, 2022

Berdasarkan penelitian peneliti terdahulu, proses penyatuan kekuatan dan kemampuan dalam memecahkan isu-isu publik yang dilakukan secara bersama relatif sangat sulit. Sementara, isu publik yang berkembang harus mendapatkan perhatian bersama dalam pemecahannya.

2.1.2. Kajian Administrasi Publik

Peran administrasi publik dalam suatu negara sangat vital. Hal ini dapat terlihat dalam suatu kondisi ekonomi suatu negara akan bergantung kepada dinamika administrasi publik itu sendiri. Di samping itu, administrasi publik menjadi sangat vital dalam membantu memberdayakan masyarakat dan menciptakan demokrasi. Administrasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan publik dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat ketika pemerintah telah meningkatkan profesionalismenya, menerapkan teknik efisiensi dan efektivitasnya.

Administrasi Publik secara bebas dapat dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana sistem penyelenggaraan negara dilakukan oleh penyelenggara negara baik itu eksekutif, legeslatif, yudikatif, pihak swasta ataupun masyarakat yang bermitra, bersinergi dalam mencapai tujuan bersama. Keban dalam Hardiansyah (2011:2-4) mengungkapkan bahwa administrasi publik memiliki variasi makna. Ada yang menterjemahkan administrasi publik sebagai *administration of public* atau administrasi *dari* publik. Ada yang *administration for public* atau administrasi *untuk* publik, dan bahkan ada yang melihatnya sebagai *administration by public* atau administrasi *oleh* publik.

2.1.2.1. Konsep Administrasi

Sejatinya, administrasi bukan hal yang asing bagi umat manusia. Karena pada hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa kehadiran manusia lainnya untuk berinteraksi, bekerja sama serta membentuk kelompok dalam rangka memenuhi segala kebutuhannya serta kesadaran bahwa dengan bekerjasama, pemenuhan kebutuhan dirasa lebih berhasil dibanding dilakukan secara individual.

Tuntutan akan pemenuhan kebutuhan manusia yang semakin meningkat dan kompleks, sulit untuk dipenuhi secara individual. Karena keterbatasan kemampuan yang di milikinya, mendorong manusia melakukan kerjasama, baik secara individual maupun secara organisasional. Dunia modern saat ini adalah dunianya kerjasama, sebab tanpa melakukan kerjasama tiap individu, tiap organisasi, bahkan tiap bangsa, negara dan pemerintahan tidak dapat *survive* (bertahan hidup).

2.1.2.2. Publik

Pasolong (2019:7-8) mengemukakan bahwa kata publik secara etimologis berasal dari bahasa Inggris "*public*" yang memiliki arti umum, rakyat umum atau orang banyak dan rakyat. Namun menurut pandangannya, kata "publik" memiliki terjemahan yang berbeda-beda bergantung pada kepentingan dalam pemaknaannya. Hal tersebut berangkat dari suatu pertanyaan yang dimilikinya, seperti kata "*Public Administration*" diterjemahkan menjadi "*Administrasi Negara*", apakah "*Public*" itu sama dengan "Negara"?, jika "*Public*" sama dengan "Negara", maka "*Public Administration*" sama dengan "*State Administration*". Sedangkan secara konseptual, cakupan "*State*" lebih luas daripada "*Public*".

Terlepas dari pertanyaan tersebut, Syafi'ie dkk (1999) dalam Pasolong (2019:7-8), mengungkapkan bahwa publik, adalah:

“Sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki”.

Sementara H. George Frederickson (1997) dalam Pasolong (2019:7-8), menjelaskan konsep “publik” dalam lima perspektif, yaitu:

- (1) Publik sebagai kelompok kepentingan, yaitu publik dilihat sebagai manifestasi dari interaksi kelompok yang melahirkan kepentingan masyarakat.
- (2) Publik sebagai pemilih yang rasional, yaitu masyarakat terdiri atas individu-individu yang berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri.
- (3) Publik sebagai perwakilan kepentingan masyarakat, yaitu kepentingan publik diwakili melalui “suara”.
- (4) Publik sebagai konsumen, yaitu konsumen sebenarnya tidak terdiri dari individu-individu yang tidak berhubungan satu sama lain, namun dalam jumlah yang cukup besar mereka menimbulkan tuntutan pelayanan birokrasi. Karena itu posisinya juga dianggap sebagai publik.
- (5) Publik sebagai warga negara, yaitu warga negara dianggap sebagai publik karena partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan warga negara dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dipandang sebagai sesuatu yang paling penting.

2.1.2.3. Konsep Administrasi Publik

Administrasi publik mengalami perubahan paradigma dari waktu ke waktu, seiring meningkatnya tuntutan kebutuhan kehidupan masyarakat yang semakin meningkat dan kompleks disertai kemajuan pola pikir masyarakat, menjadikan konsep administrasi publik terus mengalami perubahan.

Hal tersebut selaras dengan ungkapan Kasim (1994:8), yang mengungkapkan bahwa:

“Perkembangan administrasi publik di suatu negara dipengaruhi oleh dinamika masyarakatnya, dimana keinginan masyarakat tersalur melalui sistem politik, sehingga administrasi publik dapat merasakan tantangan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat yang selalu berubah”.

Pergeseran paradigma administrasi publik mulai dari *Old Public Administration* (OPA), *New Public Management* (NPM) dan *New Public Service* (NPS) hingga yang dianggap terbaru saat ini adalah *Whole of Government* (WoG) merupakan beberapa konsep pendekatan dalam penyelenggaraan pemerintahan aspek pelayanan publik yang di dasari oleh tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan negara yang dianggap tidak sesuai dan gagal, menuai ketidakpuasan masyarakat akan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, menjadikan hal tersebut sebagai faktor pendorong paradigma administrasi publik terus mengalami pergeseran. Yang pada

akhirnya, menuntut pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan melakukan reformasi pengelolaan dalam pelayanannya secara lebih efektif dan efisien.

2.1.3.1. Paradigma Baru Manajemen

Paradigma baru manajemen terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu, seiring dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat dan kompleks disertai kemajuan pola pikir kritis yang masyarakat miliki, menjadikan paradigma pengelolaan mengalami perubahan-perubahan ke arah yang dianggap lebih baik.

Kondisi tersebut selaras dengan pandangan Kasim (1994:8) yang mengungkapkan, bahwa:

“Perkembangan administrasi publik di suatu negara dipengaruhi oleh dinamika masyarakatnya, dimana keinginan masyarakat tersalur melalui sistem politik, sehingga administrasi publik dapat merasakan tantangan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat yang selalu berubah”.

Pandangan tersebut dapat dimaknai bahwa perkembangan administrasi publik dalam operasionalisasi pelayanannya terus mengalami perubahan seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin menguat dan kompleks. Sehingga menuntut pemerintah sebagai administrator untuk melakukan reformasi pengelolaan dalam pelayanannya secara lebih efektif dan efisien.

2.1.3.2. Whole of Government (WoG)

Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Oleh karenanya *Whole of Government* juga dikenal sebagai pendekatan *interagency*, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan.

2.1.4. Kepemerintahan

Secara normatif, keberadaan pemerintah merupakan salah satu unsur dari tiga unsur penting berdirinya sebuah negara modern (organisasi), di samping rakyat dan wilayah. Oleh rakyat yang bersangkutan, sebuah organisasi pemerintah diberikan kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan guna melayani kepentingan rakyat sebagai salah satu tugas pokoknya.

CF. Strong (1960) dalam Sedarmayanti (2018: 30) mengemukakan pemerintah, adalah:

“*Government is, therefore, that organization in which is vested the right to exercise sovereign powers. Government in the broad sense, is something bigger than a special body of ministers a sense in which we colloquially use it to day, when ... government, in the broader sense is charged with the maintenance of the peace and security of the state within and without*”. Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki hak untuk melaksanakan kewenangan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas

merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu kementerian yang diberi tanggung jawab memelihara perdamaian dan keamanan negara.

Sementara itu, Sedarmayanti (2018:30) mengedepankan arti pemerintahan berdasarkan ajaran Tripraja, bahwa pemerintahan dalam arti sempit yaitu kekuasaan eksekutif saja. Dimana, UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah adalah Presiden, Wakil Presiden dan Para Menteri. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

2.1.5. Good Governance

Konsep *good governance* mengisyaratkan adanya keterlibatan antara tiga pilar utama, yaitu: pemerintah, korporasi dan masyarakat sipil yang saling menjaga, *support* dan berpartisipasi aktif dalam perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan publik dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara.

Tanpa *good governance* sulit bagi masing-masing pihak untuk dapat saling berkontribusi dan saling mengawasi. *Good governance* tidak akan bisa tercapai apabila integritas pemerintah dalam menjalankan pemerintahan tidak dapat dijamin. Hukum hanya akan menjadi boomerang yang bisa balik menyerang negara dan pemerintah menjadi lebih buruk, apabila tidak dipakai sebagaimana mestinya. Konsistensi pemerintah, korporasi dan masyarakat sipil harus terjamin sebagai wujud peran masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap pihak harus bergerak dan menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

2.1.6. Collaborative Governance

Collaborative atau kolaborasi secara etimologi berasal dari kata *co* dan *labor* yang mengandung makna sebagai penyatuan tenaga atau peningkatan kemampuan yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau yang telah disepakati bersama. Secara sederhana, kolaborasi dapat dimaknai sebagai pola dan bentuk hubungan yang dilakukan antarindividu ataupun organisasi yang berkeinginan untuk saling berbagi, saling berpartisipasi untuk melakukan tindakan bersama dengan berbagi informasi serta sumber daya maupun tanggung jawab secara bersama untuk mencapai suatu tujuan bersama.

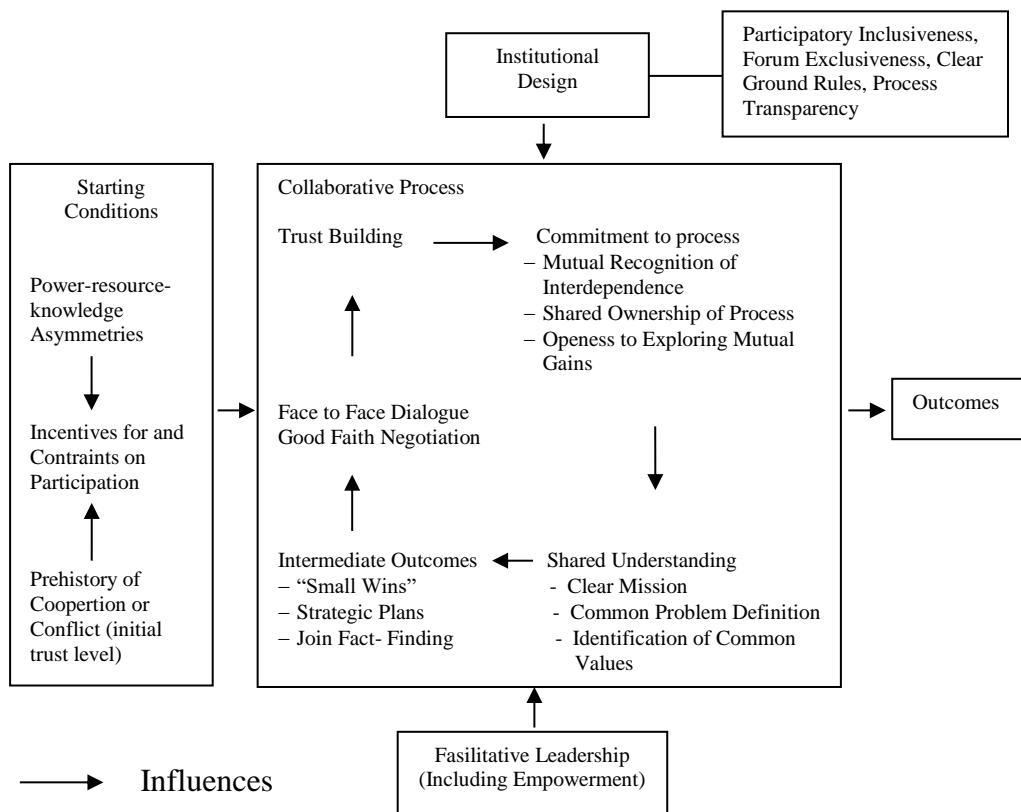
Ansell dan Gash (2008) dalam Islamy (2018:1) mendefinisikan *collaborative governance*, sebagai:

“A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets”. *Collaborative governance* merupakan sebuah model pengendalian dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan *stakeholders non-state* dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi *consensus*, deliberatif dan

bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik, mengelola program publik atau asset publik.

Lebih lanjut, Ansell dan Gash dalam Islamy (2018:2) mengemukakan enam kriteria penting dalam Kolaborasi: (1) forum yang diprakarsai oleh lembaga-lembaga publik, (2) peserta dalam forum ini termasuk aktor *non-state*, (3) peserta terlibat dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya “berkonsultasi”, (4) forum secara resmi diselenggarakan, (5) forum bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus dan (6) fokus kerjasama adalah kebijakan publik atau manajemen publik.

GAMBAR 2.1.
MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE ANSELL DAN GASH



Sumber: Islamy (2018:14)

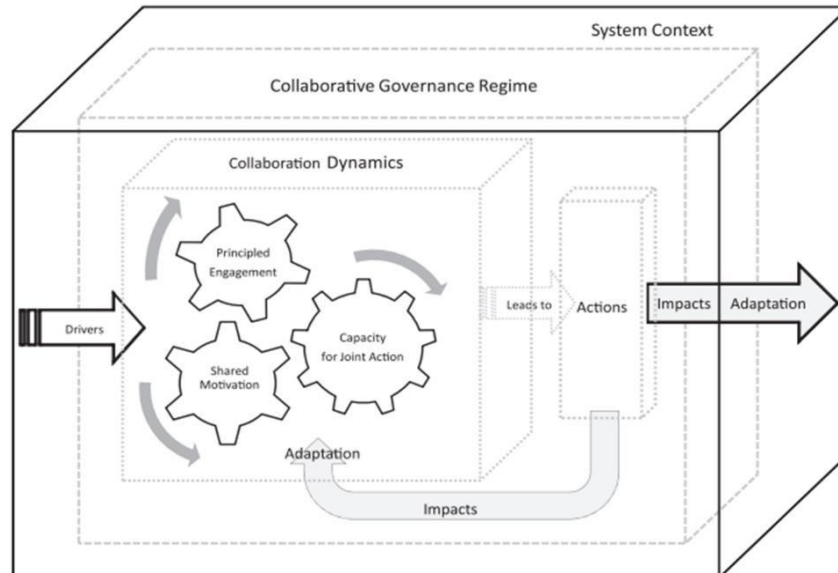
Collaborative governance senantiasa digambarkan sebagai tahap pengembangan kesepakatan yang menjelaskan bagaimana fase-fase program kolaborasi dilaksanakan mulai dari fase pra negosiasi, fase negosiasi, sampai pada

implementasi program. Sehingga keberhasilan kolaborasi bergantung pada bagaimana siklus kolaborasi itu berputar mulai dari komunikasi, membangun kepercayaan, komitmen, berbagi pemahaman sampai kepada hasil yang ingin dicapai.

Proses kolaboratif merupakan suatu proses dimana didalamnya terdapat suatu dialog yang memerlukan partisipasi para pemangku kepentingan, yang akhirnya menghasilkan suatu keputusan yang disepakati bersama. Ansell dan Gash mengidentifikasi proses kolaboratif sebagai siklus yang meliputi: dialog tatap muka (*face to face dialog*), membangun kepercayaan (*trust-building*), komitmen terhadap proses (*commitment to process*), berbagi pemahaman (*shared understanding*) dan hasil sementara (*intermediate outcome*).

Dijelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan dan atau instansi publik, instansi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja.

GAMBAR 2.2.
THE INTEGRATIVE FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE GOVERNANCE



Sumber: Subarsono (2016:199)

Menurut Balogh, *collaborative governance* memiliki berbagai dimensi, yaitu *system context*, konsep *collaborative governance* dan dinamika kolaborasi.

- Dimensi pertama digambarkan dengan kotak terluar yang merupakan ruang lingkup *system context* yang menaungi.
- Dimensi kedua merupakan bagian dari konsep *collaborative governance* yang terdiri dari dinamika kolaborasi dan aksi kolaborasi.

- Dimensi ketiga merupakan dinamika kolaborasi yang terdiri atas tiga komponen, yaitu: *principled engagement*, *shared motivation* dan *capacity for joint action*.

(1) *System Context*

Sebuah *system context* yang pasti ada dalam *collaborative governance* akan berjalan ketika terdapat komponen-komponen yang menjawab mengapa perlu adanya *collaborative governance* dalam pelaksanaan sebuah program atau kebijakan publik. Komponen-komponen tersebut yang akan mendorong proses dan perkembangan *collaborative governance*.

(2) *Drivers*

Secara umum diakui bahwa sebuah kondisi hadir pada awal terjadinya kolaborasi dapat memfasilitasi atau mencegah kerjasama antara pemangku kepentingan dan antara instansi dan pemangku kepentingan, banyak kerangka cenderung menggabungkan *system context* dan kondisi dengan *drivers* tertentu dalam kolaborasi. Namun, dalam *framework* ini, variabel *system context* dipisahkan dengan *drivers*, tanpa *drivers* maka dorongan untuk kolaborasi menjadi terhambat dan tidak berkembang. Komponen-komponen yang termasuk dalam *drivers*

(3) *Collaborative Dynamic*

Tiga komponen yang saling berkaitan dalam dinamika kolaboratif adalah:

- 1) *Principle Engagement*, merupakan hal yang muncul seiring dengan berjalannya waktu di antara para *stakeholder* yang berbeda-beda dan dalam setting yang berbeda pula. Dengan *Principle Engagement*, pihak-pihak yang tergabung dengan konten, relasi dan tujuan yang berbeda dapat bekerjasama untuk mengatasi permasalahan, meredam konflik, dan menciptakan nilai. *Principle Engagement* muncul melalui interaksi berulang-ulang dari keempat elemen berikut:
 - a) *Discovery*, berfokus pada identifikasi nilai, persoalan dan kepentingan bersama.
 - b) *Definition*, proses ini dicirikan dengan adanya keberlanjutan usaha untuk memperjelas maksud dan tujuan, penyutujuan konsep yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, serta mengklarifikasi kembali hak dan kewajiban masing-masing partisipan.
 - c) *Deliberation*, dalam memaknai dan menindaklanjuti sebuah isu maka perlu dilakukan pengkajian secara bijaksana, mempertimbangkan perspektif pihak lain dan berorientasi pada kepentingan publik, sehingga tidak berujung pada penyatuan kepentingan dari pihak yang terlibat.
 - d) *Determination*, keputusan procedural dan ketentuan substantive merupakan penggabungan dua proses dalam setiap pembuatan kebijakan dalam *principle engagement*.
- 2) *Shared Motivation* menekankan pada elemen-elemen yang ada pada aspek yang tidak nampak dalam setiap personal atau sering disebut modal sosial, terdiri dari empat elemen:

- a) *Mutual Trust*, rasa saling percaya akan muncul seiring pihak-pihak saling bekerja sama, memahami satu sama lain dan saling menunjukkan bahwa mereka layak, dapat diprediksi dan dapat diandalkan.
 - b) *Mutual Understanding*, secara spesifik merujuk pada kemampuan untuk memahami dan menghormati posisi dan kepentingan satu sama lain, meskipun ketika salah satu pihak ada yang tidak setuju. Dengan kata lain, bagaimana setiap personal memiliki rasa simpati terhadap suatu hal yang dihadapkan pada pihak lain.
 - c) *Internal Legitimacy*, dengan adanya rasa saling memahami dan menghormati peranan dan kondisi setiap personal maka akan menghasilkan rasa percaya (*interpersonal validation and cognitive legitimacy*). Masing-masing individu merasa bahwa partisipan dapat dipercaya dan kredibel sebagai rekan kerja.
 - d) *Shared Commitment*, memungkinkan partisipan untuk mengaburkan batasan-batasan sektoral, organisasional dan atau yurisdiksional dari masing-masing personal atau kelompok serta berkomitmen untuk saling berbagi.
- 3) *Capacity for Join Action*, dengan adanya kolaborasi dalam melaksanakan suatu kebijakan atau agenda maka dapat meningkatkan kapasitas kedua belah pihak untuk mencapai tujuan bersama *Capacity for join action*, meliputi:
- a) *Procedural/Institutional arrangements*, mencakup panduan proses dan struktur organisasi yang diperlukan untuk mengatur hubungan di dalam sistem.
 - b) *Leadership, collaborative governance* memerlukan dan memperkuat peran kepemimpinan sehingga sistem dan proses berjalan sesuai dengan kerangka kebijakan atau kesepakatan.
 - c) *Knowledge*, modal sosial, pengetahuan, etos kerja yang diintegrasikan dengan nilai-nilai dari seluruh pihak yang terlibat.
 - d) *Resources*, dengan adanya kolaborasi maka akan menguntungkan semua pihak dalam hal sumberdaya, karena memunculkan potensi untuk saling berbagi dan memanfaatkan sumberdaya terbatas yang dimiliki. Dengan adanya integrasi sumberdaya baik manusia, fisik maupun finansial maka kolaborasi dapat berjalan dengan semestinya.

2.1.14.2. Alasan, Manfaat dan Tujuan Kolaborasi

Kolaborasi diinisiasi atas keterbatasan kapasitas, sumberdaya maupun jaringan yang dimiliki masing-masing pihak, sehingga kerjasama dilakukan guna menyatukan dan melengkapi, yang akan mendorong pada keberhasilan pencapaian tujuan bersama. Charles Horton Cooley dalam Abdulsyani (2007) mengemukakan bahwa sebelum menentukan jenis kerjasama yang akan dilakukan, masing-masing aktor atau lembaga harus terlebih dahulu memahami hal-hal yang menjadi permasalahan baik yang sedang dialami maupun yang akan dihadapi. Kolaborasi dapat timbul apabila masing-masing pihak memahami beberapa hal berikut:

- 1) Orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan

pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut melalui kolaborasi.

- 2) Kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kolaborasi yang berguna.

2.2. Kerangka Berpikir

Collaborative governance dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung menjadi suatu kebutuhan yang mendasar (*sine qua non*). Dimana, kemajuan serta kepesatan pembangunannya harus diimbangi oleh kapasitas yang di miliki pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dalam upaya pencegahan maupun penanggulangannya. Semakin pesat pembangunan, maka lingkungan hidup akan semakin terdegradasi yang dapat memicu pelbagai potensi ancaman bencana yang semakin meningkat dan kompleks.

Hasil kajian ilmiah yang dilakukan para ilmuwan yang tergabung dalam panel perubahan iklim di seluruh dunia IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) dan UN ISDR (*United Nations Secretariat for International Strategy for Disaster Reduction*), dapat dijadikan sebagai rujukan pentingnya *collaborative governance* dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung. Dimana, suhu bumi tengah mengalami kenaikan, yang di akibatkan oleh gangguan cuaca ekstrim (*extreme climate events*) dan *trend* bencana akan meningkat secara signifikan di masa mendatang. Kondisi tersebut menjadikan suatu tantangan besar bagi masyarakat Kota Bandung dalam menghadapinya. Selanjutnya, para ilmuwan perubahan iklim seluruh dunia tersebut, menyebutkan bahwa negara Indonesia dapat menjadi suatu laboratorium bencana terlengkap di dunia (*the biggest world disaster laboratory*) karena kejadian bencananya yang cenderung terus mengalami peningkatan.

Gangguan cuaca yang ekstrim dan kejadian bencana yang cenderung terus meningkat di negara Indonesia, menjadi suatu kondisi memprihatinkan yang harus menjadi perhatian bersama dalam pengelolaan dan pengendaliannya, kondisi kadar air didalam tanah berkurang dapat memicu kebakaran mudah terjadi. Terdegradasinya lahan hijau sebagai resapan air, akan menyebabkan banjir ketika musim penghujan tiba. Menurunnya kualitas lahan dan lingkungan perlu menjadi perhatian bersama melalui pengelolaan yang terstruktur dan sistematis, agar tidak terciptanya kondisi krisis bagi Kota Bandung dalam pembangunannya.

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah wilayah atau daerah penelitian dimana peneliti

melakukan penelitian. Ada pun objek penelitian peneliti adalah Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung yang bergerak sebagai *leading sector* aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kebakaran di Kota Bandung yang beralamat di Jalan Sukabumi Nomor 17 Kota Bandung.

3.1.1. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung

Status dan berdirinya Dinas Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung telah banyak mengalami perubahan. Di awali pada jaman Kota Bandung berstatus *Gemeente* (Kotamadya), penanggulangan kebakaran di integrasikan dengan pembangunan jalan-jalan utama, dibuat hidran yang sumber airnya dihubungkan dengan pipa air minum. Saat Kota Bandung berubah status menjadi Kota Praja, menyediakan mobil pemadam kebakaran yang dikenal masyarakat dengan sebutan *Branweer*. Pemadam kebakaran pertama memiliki markas di Jalan Timur atau lebih dikenal dengan Jalan Ahmad Yani No. 296. Pada tanggal 2 Oktober 1962, Pemerintah Kota Praja Bandung membentuk Urusan Pemadam Kebakaran (UPK) yang yang menginduk ke Dinas Teknik Penyehatan (DPT) yang saat ini dikenal dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Urusan Pemadam Kebakaran berubah status menjadi Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) yang menginduk ke Dinas Pekerjaan Umum sampai dengan 1979 pada tahun yang sama, Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) mengalami perubahan kembali menjadi di bawah Sub Direktorat Ketertiban Umum (TIBUM) pada tahun 1980 sesuai dengan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 1980 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran, pengelolaan kebakaran statusnya berubah kembali menjadi unit tersendiri yaitu Dinas Kebakaran.

Pada era reformasi, penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, maka pengelolaan penanggulangan kebakaran mengalami perubahan kembali menjadi Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2001 tanggal 7 Maret 2001. Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung saat ini merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diatur oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung yang bergerak di Bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran serta tindakan Penyelamatan yang di landasi Keputusan Walikota No.875.1/Kep.522-diskar/2012 tentang pendelegasian sebagian wewenang Walikota Bandung kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kebakaran Kota Bandung dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pasal 14 Peraturan Daerah Kota Bandung No. 05 Tahun 2013 dan Peraturan Walikota Bandung No. 297 Tahun 2013 tentang Tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung serta nomenklatur baru berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1400 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebakaran Dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung.

GAMBAR 3.1.

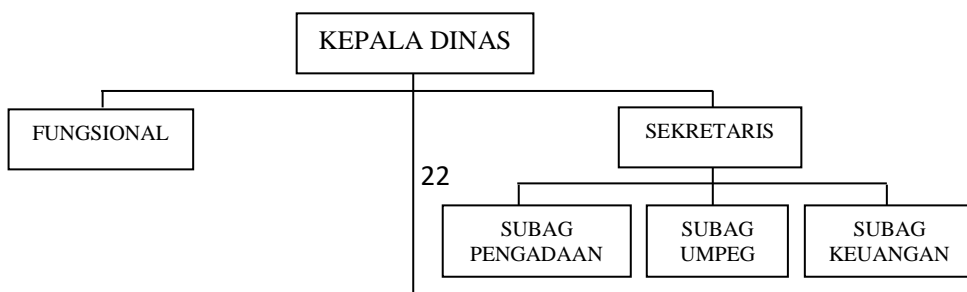
KANTOR DINAS KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA BANDUNG



Sumber: Diskar PB Kota Bandung

Seiring berjalan waktu dan perkembangannya, terdapat beberapa substansi yang harus disempurnakan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan sub urusan bencana. Oleh sebab itu, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 terbit sebagai pertimbangan kebijakan yang diterapkannya tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Berikut Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung:

GAMBAR 3.2.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBAKARAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA KOTA BANDUNG



Sumber: Peraturan Wali Kota Bandung No. 11 Tahun 2021

a. Visi

Bertitik tolak dari dasar filosofi pembangunan daerah Kota Bandung, yang memiliki visi dasar pemerintah Kota Bandung, yaitu: “Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis”

b. Misi

Bertitik tolak dari misi dasar Kota Bandung, yaitu:

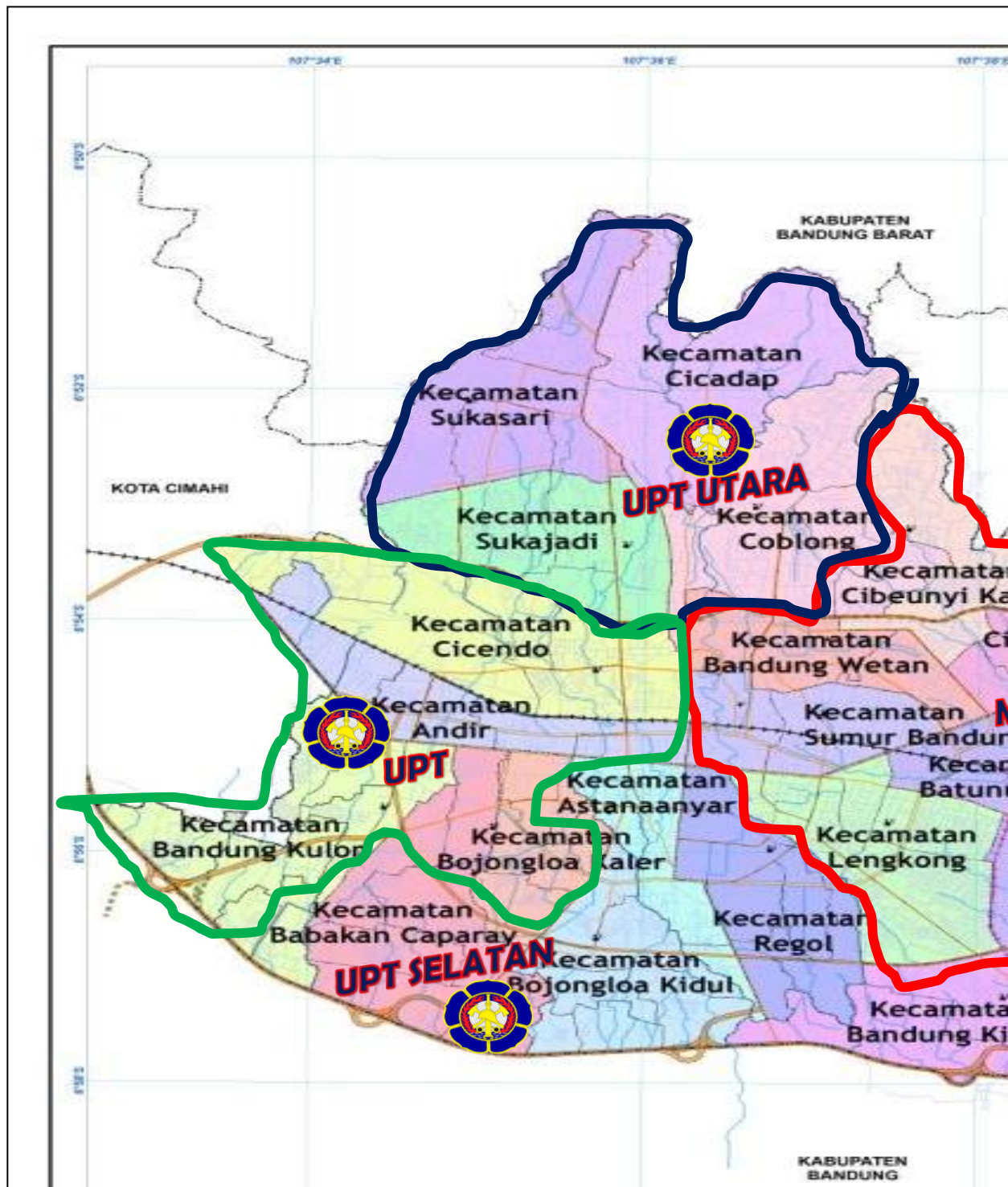
- 1) Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing;
- 2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani;
- 3) Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh dan berkeadilan;
- 4) Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan; dan
- 5) Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi.

Petugas pemadam kebakaran di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung merupakan Pegawai Negeri Sipil yang dilatih dan

dibekali keterampilan dalam hal penanggulangan bencana kebakaran di Wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Teknis pelayanan masyarakat terkait urusan kebakaran dan urusan bencana di Kota Bandung, dinas tersebut membagi 4 (empat) Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) guna memberikan pelayanan yang lebih optimal terhadap masyarakat. Berikut Wilayah Manajemen Kebakaran di Kota Bandung:

GAMBAR 3.3.
PETA WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN DAN BENCANA
DI KOTA BANDUNG





Sumber: Bidang Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung

Pada 4 (empat) Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), dinas tersebut mendirikan Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) guna mendukung dan membantu pelayanan sub urusan kebakaran dan bencana agar layanan dapat dilakukan

dengan lebih cepat dan optimal. Berikut alamat kantor pelayanan Dinas Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung:

3.2. Metode Penelitian

Metode penelitian didefinisikan oleh Sugiyono (1997) dalam Bachtiar (2011:121) bahwa metode penelitian, adalah:

“ Sebagai cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data yang obyektif, valid, dan variabel, dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam administrasi”.

Dengan demikian, peneliti melakukan penelitian dengan cara yang ilmiah untuk mendapatkan data serta informasi terkait belum optimalnya model *collaborative governance* dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung untuk dapat dipahami, mencari solusi serta evaluasi dalam pelaksanaannya.

3.3. Operasional Parameter

Konsep atau pengertian ini merupakan unsur pokok dari suatu penelitian untuk menghindari penafsiran yang berbeda, maka dari masing-masing faktor secara konsepsional dapat dirumuskan, sebagai berikut:

Model *Collaborative governance* dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung dapat dilakukan berdasarkan model *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash dengan parameter: (1) Kondisi Awal; (2) Kepemimpinan Fasilitatif; (3) Desain Kelembagaan; dan (4) Proses Kolaborasi.

Sesuai dengan ruang lingkup penelitian yang ditetapkan, maka peneliti menggunakan model *collaborative governance* yang diungkapkan oleh Ansell dan Gash dalam tabel berikut:

TABEL 3.6.
OPERASIONALISASI KONSEP

No.	Variabel	Dimensi	Indikator	Item	Sumber Data
1.	Model Collaborative Governance Ansell dan Gash	Kondisi Awal	Sumber Daya	1) Kualitas dan Kuantitas SDM 2) Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana	Wawancara, dokumen dan observasi
			Konflik	3) Ego sektoral/siloisasi	Wawancara dan observasi
			Insentif	4) Keuntungan bersama	Wawancara
		Kepemimpinan	Pemberdaya	5) Penguatan	Wawancara,

		Fasilitatif	an masyarakat	sosialisasi 6) Penguatan koordinasi 7) Penguatan kerjasama	dokumen dan observasi	
		Desain Kelembagaan	Inklusivitas partisipan	8) Mampu merangkul partisipan dari berbagai kalangan	Wawancara, dokumen dan observasi	
			Eksklusivitas forum	9) Forum mandiri terlepas dari organisasi inti yang dimiliki	Wawancara, dokumen dan observasi	
			Aturan-aturan dasar yang jelas	10) Pembagian tugas apa, siapa dan bagaimana	Wawancara, dokumen dan observasi	
			Transparansi proses	11) Seluruh stakeholder memiliki kesempatan yang sama	Wawancara, dokumen dan observasi	
		Proses Kolaborasi	Dialog tatap muka	12) Negoisasi atas dasar kepercayaan yang baik	Wawancara, dokumen dan observasi	
			Membangun kepercayaan	13) Kejelasan tujuan	Wawancara, dokumen	
			Komitmen pada proses		14) Saling memahami ketergantungan	Wawancara, dokumen dan observasi
					15) Kepemilikan proses bersama	Wawancara, dokumen dan observasi
					16) Keterbukaan terhadap pengembangan capaian bersama	Wawancara, dokumen dan observasi
			Berbagi pemahaman	17) Penguatan pemahaman bersama	Wawancara, dokumen dan observasi	
					18) Definisi masalah bersama	Wawancara, dokumen dan observasi
		19) Identifikasi nilai-nilai bersama			Wawancara, dokumen dan observasi	
		Hasil Sementara	Kemenangan kecil	20) Evaluasi proses	Wawancara, dokumen dan	

					observasi
			Rencana strategis	21) Perumusan strategis	Wawancara, dokumen dan observasi
			Temuan fakta bersama	22) Perumusan manajemen yang efektif dan efisien	Wawancara, dokumen dan observasi

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam setiap penelitian, data merupakan faktor penting yang akan menentukan pada bagaimana hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pengumpulan data memiliki peran strategis dalam penelitian. Dengan terkumpulnya data, maka upaya menganalisa sudah dapat dilakukan oleh instrument penelitian. Teknik pengumpulan data pada dasarnya merupakan serangkaian proses yang dilakukan sesuai dengan metode penelitian yang dipergunakan.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a) Studi Kepustakaan Penelitian Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku, dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan dinas yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.
- b) Studi Lapangan Studi lapangan yaitu peneliti secara langsung mendatangi objek yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data ini terdiri dari:

- 1) Observasi

Observasi adalah metode yang dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap objek, gejala atau kegiatan tertentu. Teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh data serta informasi bagi penelitian yang relevan mengenai model *collaborative governance* dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.

- 2) Wawancara

Wawancara adalah teknik untuk memperoleh informasi melalui percakapan langsung dengan responden atau subjek penelitian. Percakapan tersebut dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara dengan maksud tertentu.

- 3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian data melalui catatan peristiwa berupa tulisan, gambar, notulen, agenda dan karya-karya. Dokumentasi berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap dari data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dokumentasi diperlukan untuk lebih memperkaya data yang diperoleh peneliti, sehingga diharapkan data tersebut lebih dapat dipertanggungjawabkan keabsahan datanya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Pada tahap ini, peneliti akan menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan disertai penjelasannya. Hasil penelitian yang disajikan berdasarkan temuan-temuan peneliti selama melakukan observasi di lapangan selama proses penelitian dilakukan.

Hasil penelitian ini didapat peneliti melalui teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) pada beberapa informan kunci (narasumber) yang dianggap relevan pada waktu dan tempat yang tidak ditentukan. Hal tersebut dilakukan guna menghindari subjektivitas data dalam penelitian dan peneliti tidak membatasi jumlah informan kunci, hal tersebut dilakukan dengan maksud agar peneliti mendapatkan data-data maupun informasi yang lebih mendalam, sehingga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi model *collaborative governance* dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung dengan optimal. Penelitian ini dimuali dari penjajakan lapangan pada awal bulan November 2022. Peneliti langsung melakukan observasi terkait situasi dan kondisi kolaborasi dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.

Seiring dengan kepesatan pembangunan di Kota Bandung, potensi ancaman kebakaran pun turut meningkat dan semakin kompleks. Hangusnya pemukiman penduduk, rusaknya lingkungan hidup dan sarana prasarana utilitas umum, hilangnya harta benda, korban jiwa hingga gangguan psikologis merupakan potensi ancaman bahaya kebakaran yang harus ditangani dan ditanggulangi bersama secara lebih efektif dan efisien. Terlebih, potensi ancaman akan terus meningkat secara signifikan seiring dengan adanya isu semakin meningkatnya perubahan iklim global dan degradasi lingkungan.

Semakin meningkatnya potensi ancaman kebakaran perlu menjadi perhatian bersama dalam pengelolaannya sebelum potensi tersebut berubah menjadi suatu bencana yang berdampak pada kerugian yang lebih luas dan berpotensi menciptakan kondisi krisis bagi Kota Bandung dalam pembangunannya. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pentingnya peningkatan kapasitas dalam arti luas, yakni berupa peningkatan kapasitas dan peran aparat pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi dan media dalam upaya secara bersama guna meminimalisir potensi ancaman tersebut.

Kondisi *collaborative governance* dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung menjadi salah satu pertanyaan peneliti seiring dengan meningkatnya potensi ancaman kebakaran di Kota Bandung dan bagaimana proses kolaborasi dilakukan, faktor hambatan apa yang menghambat proses kolaborasi, upaya apa dan model kolaborasi apa yang diterapkan oleh Dinas Kebakaran dan

Penanggulangan Bencana Kota Bandung sebagai *leading sector* bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan sub urusan bencana di Kota Bandung.

4.1.1. Gambaran Umum Model *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kebakaran Di Kota Bandung

Collaborative governance dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung merupakan sebuah model pengendalian dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan *stakeholders non-state* dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus (kesepakatan), deliberatif (musyawarah) yang bertujuan untuk membuat/merumuskan dan menerapkan kebijakan dalam mengelola kebakaran di Kota Bandung agar potensi kejadian dan kerugiannya dapat diminimalisir dan tidak berdampak luas terhadap proses pembangunannya.

Collaborative governance dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung sejatinya melibatkan seluruh kalangan masyarakat, baik lembaga pemerintah, pihak swasta, akademisi, masyarakat atau pun pihak media, mengingat pembangunan di Kota Bandung merupakan urusan bersama yang memerlukan sinergitas tinggi dalam upaya mewujudkan tujuan bersama dengan meminimalisir potensi ancaman maupun penanggulangannya.

4.1.2. Pelaksanaan *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kebakaran Di Kota Bandung

Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dalam operasional kerjanya cenderung melibatkan beberapa sektor, baik lembaga pemerintahan lainnya, pihak swasta, komunitas masyarakat, akademisi hingga pihak media. Adanya interdependensi antaraktor (multisektor) dalam upaya penanganan kebakaran di Kota Bandung dalam kehidupan di Kota Bandung, menjadikan kolaborasi sebagai kebutuhan sekaligus tuntutan yang *sine qua non* (tidak boleh tidak harus ada). Dimana, semakin besar interdependensi dalam kehidupan dan penghidupan antaraktor atau antarorganisasi, maka semakin besar pula kebutuhan untuk berkolaborasi, baik dilakukan secara vertikal, horizontal maupun diagonal.

4.2. Pembahasan

Penanganan kebakaran merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat dimensional yang dialami oleh Kota Bandung. Pemerintah Daerah melalui Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung telah berupaya menyelenggarakan program dalam upaya penanganan kebakaran berupa penyuluhan, sosialisasi maupun pelatihan, namun demikian banyaknya kegiatan tersebut dilakukan tidak serta merta mampu mengurangi angka kebakaran di Kota Bandung secara signifikan. Pola Penanganan Kebakaran, tidak dapat lagi diserahkan dan dilakukan secara mandiri kepada/oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung sebagai *leading sector*, melainkan membutuhkan upaya *collaborative governance* yang melibatkan para pemangku

kepentingan lainnya.

Collaboative governance merupakan salah satu instrumen kerjasama yang melibatkan beberapa aktor dalam proses pemerintahan yang mencerminkan konsep *good governance* yang diterapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan mengedepankan pemerintahan kolaboratif dalam memecahkan permasalahan dalam pembangunan. Demikian halnya dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung, semua aktor baik elemen pemerintah, pihak swasta, masyarakat, akademisi dan pihak media terlibat secara kolektif dalam implementasinya. *Collaborative governance* dengan konsep *pentahelix* merupakan pendekatan yang relevan dalam pelaksanaannya, mengingat penanganan kebakaran di Kota Bandung mengisyaratkan adanya interdependensi antara *stakeholder* satu dengan *stakeholder* lainnya.

4.2.1. Pelaksanaan Model *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kebakaran Pada Dinas Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung

Pelaksanaan *collaborative governance* yang dilakukan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung akan berjalan optimal jika *leading sector* tersebut menjadikan faktor-faktor pendukung kolaborasi sebagai pusat perhatian dalam prosesnya. Di mulai dari perhatiannya dalam kondisi awal yang dimiliki, desain kelembagaan dalam kolaborasi, kepemimpinan fasilitatif yang diterapkannya hingga dalam proses dalam kolaborasinya. Proses kolaborasi merupakan inti dari model *collaborative governance* ini, ketiga faktor lainnya hanya sebagai pendukung yang dapat mempengaruhi dalam prosesnya.

Proses kolaborasi akan menjadi suatu siklus yang berkaitan erat dalam implementasinya. Dimana, proses *collaborative governance* dalam penanganan kebakaran akan meliputi proses dalam kondisi *face to face dialogue* (dialog tatap muka) dalam berkomunikasi dan negosiasi dengan itikad baik, *Trust Building* (membangun kepercayaan) antar peserta kolaborasi, *Commitment to Process* (komitmen pada proses) atau membangun komitmen bersama, *Shared Understanding* (berbagi pemahaman) tentang misi dan permasalahan yang dihadapi serta *Intermediate Outcome* (hasil akhir yang dicapai) sebagai lanjutan dari proses kolaborasi yang terwujud dalam bentuk *output* atau *feedback* dalam pembangunan komitmen bersama.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari data-data dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di atas dan pada rumusan masalah yang sudah di tetapkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa:

- 1) *Collaborative governance* dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung belum dapat dilakukan secara optimal. Dimana secara pendekatan teori, dimensi-dimensi pendukung yang memberikan kontribusi penting dalam proses kolaborasi, belum dijadikan sebagai pusat perhatian oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dalam proses pembangunannya. Dimensi Kondisi Awal, Kepemimpinan Fasilitatif dan Desain Kelembagaan yang belum dijadikan sebagai pusat perhatian dalam pelaksanaannya, berdampak pada dimensi Proses Kolaborasi penanganan kebakaran di Kota Bandung yang dilakukan, belum optimal. Meskipun dimensi proses kolaborasi dalam *collaborative governance* dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung sebagai inti dari model *collaborative governance*, namun ke-tiga dimensi lainnya merupakan dasar yang fundamental dalam membangun infrastruktur organisasi terkait pelaksanaan *collaborative governance* dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung.
- 2) Faktor penghambat belum optimalnya *collaborative governance* dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung yang dilakukan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, yakni kurangnya pemahaman secara mendalam dan komitmen yang ditunjukkan para *stakeholder* terkait pentingnya pemerintahan kolaboratif (*collaborative governance*) dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung. Adanya perbedaan orientasi/fragmentasi pekerjaan dan tanggung jawab, kesenjangan pemahaman, kesenjangan sumberdaya (anggaran/biaya) hingga sikap primordialisme/ego sector antar *stakeholder* kerap menjadi penyebab terhambatnya pelaksanaan *collaborative governance* dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung.
- 3) Upaya-upaya yang dilakukan dalam membangun pemerintahan kolaboratif (*collaborative governance*) relatif masih rendah. Hal tersebut dapat disebabkan oleh infrastruktur organisasi yang belum optimal dalam pembangunannya. Penyuluhan, sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung yang cenderung belum merata/*holistic* dan berkesinambungan, berdampak kepada tingkat kepercayaan, pemahaman serta komitmen para *stakeholder* dalam pelaksanaan *collaborative governance* dalam penanganan kebakaran di Kota

Bandung.

Penerapan model *collaborative governance* dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung yang dilakukan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung belum melalui pendekatan *collaborative governance* secara teoritis atau belum menggunakan model kolaborasi tertentu. Model *collaborative governance* belum dilakukan dengan metode yang lebih sistematis, terstruktur dan berkesinambungan, sehingga belum dapat diukur dan dipelajari untuk dijadikan sebagai strategi di masa mendatang.

5.2. Saran

Sejatinya, *collaborative governance* dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung merupakan wujud operasionalisasi prinsip dari konsep *good governance*. Dimana, para pemangku kepentingan/*stakeholders* (pemerintah, pihak swasta, masyarakat, akademisi dan media) masing-masing memiliki keterbatasan tertentu dengan kapasitas yang berbeda-beda. Untuk itu, kemitraan menjadi jawaban dalam upaya meminimalisir potensi ancaman serta kemungkinan kerugian besar yang mungkin ditimbulkan dari suatu musibah kebakaran. Semula tata kelola pemerintahan berorientasi pada bekerja secara mandiri menjadi bekerjasama secara gotong royong untuk mencapai tujuan bersama di Kota Bandung. *Collaborative governance* dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung diperlukan adanya sinergi kerja yang berbasis komitmen bersama untuk menyelaraskan pemahaman terkait pentingnya penyelenggaraan tersebut bagi pembangunan kehidupan di Kota Bandung.

Ada pun beberapa saran peneliti berdasarkan penelitian di lapangan terkait Model *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kebakaran Di Kota Bandung yang dapat dijadikan sebagai alternatif pemecahan masalah bagi Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, sebagai berikut:

- 1) Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dapat mengadopsi dan menerapkan konsep dan teori model *collaborative governance* dari Ansell dan Gash dalam upaya penanganan kebakarannya di Kota Bandung;
- 2) Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung harus mampu menjadikan dimensi-dimensi *collaborative governance* sebagai pusat perhatian dalam mendukung upaya pembangunan *collaborative governance* dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung;
- 3) Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung harus memiliki komitmen dan integritas tinggi dalam pembangunan infrastruktur organisasi melalui pendekatan merit sistem yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik yang ditunjukkan organisasi serta selalu mengedepankan pemerintahan kolaboratif dalam upaya melindungi masyarakat Kota Bandung dari potensi ancaman maupun kerugian yang mungkin ditimbulkan dari suatu musibah kebakaran;
- 4) Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Kebakaran Bencana Kota Bandung harus mampu meningkatkan intensitas dan kualitas komunikasi, interaksi dan koordinasi antar *stakeholders* yang dapat membuahkan *collaborative*

governance dalam penanganan kebakaran di Kota Bandung secara lebih efektif, efisien dan produktif;

- 5) Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung perlu menerapkan gaya kepemimpinan fasilitatif dalam upaya pembangunan *collaborative governance* penanganan kebakaran di Kota Bandung. Sebagai

- 6) *leading sector* di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan sub urusan bencana di Kota Bandung serta memiliki kemampuan dalam memfasilitasi dan menghargai perbedaan dan kecerdasan emosional internal organisasi maupun eksternal organisasi karena organisasi ataupun individu pegawai memiliki etos kerja yang cenderung berbeda satu sama lainnya;
- 7) Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung harus meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi dan penyuluhan secara merata, menyeluruh serta berkesinambungan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan tujuan menumbuhkan tingkat kesadaran dan kewaspadaan sekaligus menjadi kekuatan kritis yang konstruktif dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hanafi, M Mamduh. 2016. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kountur, Ronny. 2006. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Abdi Tandur.
- Kusumasari, Bevaola. 2014. *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Gava Media
- Lia Muliawaty. (2019). PELUANG DAN TANTANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI ERA DISRUPSI. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 1-11.
- Miles. M., & Huberman, A. 1994. *Qualitative Data Analysis*. Sage: Beverly Hills, CA.
- Moleong, LJ. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rodakarya.
- Mulyadi, Dedi. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2019. *Teori Adminitrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ramli, Soehatman. 2010. *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management)*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Ramli, Soehatman. 2010. *Petunjuk Praktis Manajemen Kebakaran (Fire Manajement)*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Sandhyavitri, dkk. 2015. *Mitigasi Bencana Banjir dan Kebakaran*. Pekanbaru: UR Press Pekanbaru.
- Sangkala. 2012. *Dimensi-Dimensi Manajemen Publik*. Yogyakarta: Ombak.
- Sedarmayanti. 2018. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Silalahi, Ulbert. 1989. *Sudi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Subarsono, Agustinus. 2016. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu ontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Syaiful Islamy, La Ode. 2018. *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. Deepublish: Yogyakarta

Regulasi:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang diamanatkan pada Pembukaan/Preamble dan pada Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.Kep.186/MEN1999 Tentang Unit Penanggulangan Kebakaran Ditempat Kerja;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 25/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 16 Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah;
- Buku pedoman Pegawai Negeri Kota Bandung yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2012;
- Peraturan Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor: 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (“PP 79/2013”) Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 8 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Walikota Bandung Nomor: 1400 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
- Peraturan Walikota Bandung Nomor: 982 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- Visi dan Misi Kota Bandung.

Sumber lain:

- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/kota-bandung-wilayah-terpadat-di-jawa-barat-pada-2021>: Di akses pada tanggal 31 Maret 2022
- <https://nasional.kompas.com/read/perbedaan-government-dan-governance>: Diakses pada tanggal 15 Maret 2022